

## Studi Perbandingan Terpilihnya Presiden Corazon Aquino Tahun 1986 dan Presiden Megawati Soekarnoputri Tahun 2001

Annisa Febrianty Rahayu<sup>1</sup>, Eka Yulyana<sup>2</sup>

*Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

*Universitas Singaperbangsa karawang*

<sup>1</sup>2010631180048@student.unsika.ac.id, <sup>2</sup>eka.yulyana@staff.unsika.ac.id

Dikirim: 23 Maret 2024 Direvisi: 25 April 2024 Diterima: 30 Mei 2024

### Abstrak

Artikel ini menjelaskan mengenai perbandingan partisipasi perempuan dalam menjadi pimpinan suatu negara di Asia tenggara yaitu Indonesia dan Filipina. Corazon Aquino dan Megawati Soekarnoputri menjadi tonggak bagi perempuan-perempuan lain untuk menjadi pemimpin dalam pemerintahan. Artikel ini juga menjelaskan bagaimana awal perjalanan sehingga dapat menjadi pemimpin suatu negara dan dipercaya oleh publik dalam mengatasi permasalahan yang dialami pimpinan sebelumnya. Walaupun jika dilihat perbandingan tokoh perempuan kedua negara ini dapat disimpulkan bahwa perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam dunia perpolitikan. Sebelumnya, tidak ada perempuan yang menjadi pemimpin di kedua negara yaitu Indonesia dan Filipina, setelah kedua tokoh perempuan tersebut menjabat tidak ada tokoh pemimpin perempuan yang menjadi kepala negara. Dalam menganalisis permasalahan ini penulis menggunakan teori partisipasi politik dengan pendekatan *Behavioral* dimana penulis memilih teori dari David Easton dalam Nasiwan (2010:37) mengungkapkan mengenai model psikologi, dimana model ini berusaha memahami tentang tingkah laku. Sementara itu metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode komparatif. Data-data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan kajian literatur. Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Partisipasi perempuan dalam perpolitikan maupun penyelenggaraan negara tidak terlepas dari latar belakang keluarga baik dari seorang suami, orang tua, maupun sanak saudara yang sebelumnya telah menjadi salah satu tokoh dalam dunia perpolitikan.

**Kata Kunci:** Partisipasi politik, Perempuan, Indonesia, Filipina.

### Abstract

*This article explains the comparison of women's participation in becoming leaders of a country in Southeast Asia, namely Indonesia and the Philippines. Corazon Aquino and Megawati Soekarnoputri became milestones for other women to become leaders in government. This article also explains how to start the journey so that you can become the leader of a country and be trusted by the public in overcoming the problems experienced by previous leaders. Even if we look at the comparison of female figures in these two countries, it can be concluded that women can participate actively in the world of*

*politics. Previously, there were no women who became leaders in the two countries, namely Indonesia and the Philippines. After these two female figures took office, no female leaders became heads of state. In analyzing this problem the author uses the theory of political participation with a Behavioral approach where the author chooses the theory from David Easton in Nasiwan (2010:37) who reveals a psychological model, where this model tries to understand behavior. Meanwhile, the research method used is a qualitative approach with comparative methods. Data was collected through literature study with literature review. The results of this research conclude that women's participation in politics and state administration cannot be separated from the family background of a husband, parents or relatives who have previously been figures in the world of politics.*

**Keywords:** *Political participation, Women, Indonesia, Philippines*

## PENDAHULUAN

Indonesia dan Filipina merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki sistem pemerintahan yang sama yaitu sistem demokrasi. Sistem demokrasi inilah yang menjadi salah satu indikator bahwa siapa saja yang berhak untuk berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan negara. Dalam setiap penyelenggaraan negara demokrasi semua, masyarakat baik dari berbagai kalangan tanpa adanya aspek perbedaan berhak untuk menjadi pemimpin atau aktor dalam penyelenggaraan suatu negara. Menurut Sibarani dalam (Kusuma, 2023) Langkah untuk mencapai demokrasi di suatu negara terkait dengan penyelenggaraan pemilihan parlemen. Permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan demokrasi dan demokratisasi suatu negara terkait pemilihan umum, pemilihan umum merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur perkembangan demokrasi secara prosedural dan esensial dalam suatu negara, agar pemilu dilaksanakan secara adil dan demokratis, sehingga tercipta demokrasi. Hal tersebut dapat menciptakan suatu demokrasi di sebuah negara dapat berkembang secara sehat.

Negara demokrasi mempunyai ciri-ciri yang melibatkan masyarakat pada perencanaan dan partisipasi politik. Bagian terpenting dari demokrasi adalah partisipasi politik (Liando, 2016). Sebagai negara demokrasi tentunya dalam setiap pemilihan pemimpin terdapat calon kandidat yang berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan umum yang akan langsung dipilih oleh masyarakatnya sendiri tanpa perantara. Pemilihan Umum menjadi salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan negara demokrasi. Pemilihan Umum merupakan mekanisme untuk memilih anggota parlemen yang diharapkan menjadi suara rakyat dalam pemerintahan, sehingga tanggung jawab seorang politisi dalam membuat kebijakan-kebijakan sejalan dengan opini publik.

Miriam Budiarto mengemukakan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik dengan cara memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kemudian Ramlan Surbakti mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan (Sastrawati, 2020).

Beberapa gagasan sebagai kesepakatan pandangan berbagai negara di dunia dapat dijadikan rujukan sebagai kerangka Internasional partisipasi perempuan diantaranya seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW)*, *Beijing Platform for Action*, dan

Deklarasi IULA tentang Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Junaenah, 2018).

Pada dasarnya partisipasi politik perempuan menjadi kegiatan sukarela kaum perempuan yang bergabung pada komunitas kaukus perempuan politik yang terdiri dari berbagai unsur seperti pengamat politik, aktivis perempuan, kader perempuan partai politik dan sebagainya, sehingga dalam hal ini mereka mengambil bagian pada proses penguasa baik langsung atau tidak langsung. Secara umum partisipasi tidak hanya pada bidang politik, melainkan dalam segala bidang kehidupan karena perempuan juga ikut serta atau berpartisipasi aktif, hanya saja selama ini terjadi kesenjangan antara kaum laki-laki dan perempuan yang diakibatkan oleh produk-produk kebijakan yang bias gender, sehingga membutuhkan perjuangan keras dari perempuan dari segala lini terutama pada lini politik yang sangat berpengaruh terhadap produk kebijakan (Warjiyati, 2016).

Akan tetapi Realitas politik di banyak negara termasuk Indonesia pasti sangat berdampak pada semua kelompok termasuk wanita, namun terdapat permasalahan dalam peran dan posisi perempuan dalam dunia politik, karena mereka memiliki peran dalam menentukan nasibnya sendiri melalui keputusan politik (Nimrah dan Sakaria et al., 2015).

Dalam artikel (Arawi, 2022) juga dijelaskan bahwa penerapan representasi perempuan di parlemen Indonesia dan Filipina kebijakan masih dipengaruhi oleh budaya patriarki dimana perempuan masih cenderung ditempatkan pada opsi terakhir atau pelengkap sebagai representasi 30 % dalam pencalonan.

Akan tetapi, hal tersebut dapat dipatahkan bahkan jauh dari sebelumnya ketika perempuan menjadi salah satu kandidat pencalonan presiden di Filipina tahun 1984 dan pencalonan presiden di Indonesia tahun 2001. Dengan adanya hal itu, bisa kita ketahui bahwa partisipasi perempuan dalam berpolitik sudah pernah terjadi bahkan sebagai pemimpin nomor satu suatu negara. Indonesia yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri dan Filipina yang di pimpin oleh Corazon Aquino. Tokoh perempuan tersebut menjadi salah satu tokoh perempuan pertama dalam sejarah tokoh kepemimpinan di negara Asia Tenggara bahkan dunia. Kepemimpinan di suatu negara tidak lagi hanya diisi oleh kaum laki-laki. Geliat politik perempuan mulai ikut andil dalam percaturan kepemimpinan pada suatu negara. Kepemimpinan perempuan hadir dalam berbagai bentuk, baik sebagai kepala negara maupun sebagai pemimpin pemerintahan tingkat bawah seperti gubernur, walikota dan Kepala Desa. hal tersebut membuktikan bahwa munculnya perempuan pada posisi kepemimpinan yaitu sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan.

Dalam penelitian ini digunakan teori partisipasi politik Behaviorisme. Teori ini menitikberatkan perhatian pada tindakan politik individu yang menonjolkan saejauhmana pengetahuan politik sehingga akan berpengaruh pada perilaku politiknya (Nasiwan, 2010:33). David Easton dalam Nasiwan (2010:37) mengungkapkan mengenai model psikologi, dimana model ini berusaha memahamkan tentang tingkah laku yang menekan proses belajar dengan variabel seperti : 1) Situasi stimulan yang membangkitkan tindakan di dalam lingkungan seperti hanya yaitu menggabungkan diri dengan partai politik, sebagai upaya memperoleh akses kekuasaan, 2) Timbul dorongan sehingga melakukan sebuah upaya memperoleh akses kekuasaan, 3) Variabel individu semacam keturunan, usia, jenis kelamin, kondisi fisiologi yang menentukan cara orang memahami suatu kesempatan yang tersedia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode komparatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang menjadikan filsafat *post positivism* sebagai landasan dengan tujuan untuk menelaah atau meneliti kondisi alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci dalam proses pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan triangulasi yang bersifat induktif atau kualitatif dimana lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2012).

Metode komparatif adalah metode membandingkan berbagai variabel yang muncul ketika melakukan suatu penyelidikan dengan menetapkan indikator-indikator untuk menghubungkan dan menguji masalah yang akan dipecahkan (Silalahi, 2012).

Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode komparatif adalah mengukur seberapa besar persamaan dan perbedaan dengan membandingkan partisipasi tokoh perempuan pada pemilihan presiden di Indonesia dan Filipina. Dalam proses pengumpulan data peneliti menggunakan studi kepustakaan dengan kajian literatur dari hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan partisipasi tokoh perempuan pada pemilihan presiden di Indonesia dan Filipina dengan diperoleh data dari berbagai referensi seperti jurnal, artikel, berita online, dan data dari situs resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Partisipasi perempuan pada situasi stimulan yang membangkitkan tindakan untuk bergabung dengan dengan partai politik**

Pemilihan Umum tahun 1999 merupakan agenda penting setelah tumbangnya pemerintahan Orde Baru (1966-1998). Pemilu 1999 dapat terlaksana setelah Presiden BJ Habibie menyatakan kesediaannya untuk mempercepat pelaksanaan pemilihan umum yakni paling lambat bulan juni tahun 1999. Banyak partai politik baru yang ikut serta dalam pemilu 1999, yakni sebanyak 48 partai politik. Salah satunya adalah PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) pimpinan Megawati Soekarnoputri yang kemudian keluar sebagai pemenang pada pemilu tahun 1999 dengan perolehan suara 33,76% suara, kemudian langsung mengusulkan nama Megawati Soekarnoputri sebagai Calon Presiden Indonesia untuk bersaing dalam Sidang MPR RI (Majelis Permusyawaratan Rakyat) yang diselenggarakan pada bulan Oktober 1999.

Sementara itu di Filipina melalui konstitusi 1935 yang tidak bertahan lama, Presiden Ferdinand Marcos pada tahun 1973 melakukan amandemen konstitusi 1935 yang sebelumnya menggunakan sistem pemerintahan presidensial di Filipina, kemudian diubah menjadi sistem parlementer. Langkah tersebut dinilai sebagai jalan alternatif untuk meratakan pemerintahan otoriter Ferdinand Ramos agar tetap bisa memenangkan pemilu presiden. Banyaknya pemberontakan dari berbagai kalangan terhadap Presiden Marcos salah satunya dan Revolusi ESDA dan revolusi ini membuat presiden Marcos lengser dari jabatannya. Pasca lengsernya Presiden Marcos posisi atau pengambil alih pimpinan diberikan kepada Corazon Aquino sebagai Presiden Filipina dan hal ini juga merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepemimpinan Filipina bahkan dunia sebagai salah satunya menjadi pemimpin negara wanita. Corazon Aquino mengamandemen konstitusi pada tahun 1987 dan mencabut beberapa

konstitusi tahun 1973 pada masa pemerintahan Marcos I. Konstitusi 1987 disahkan melalui referendum pada tanggal 2 Februari 1987, terdiri dari 18 artikel dan 321 *section*. Corazon Aquino, presiden Filipina ke -11 membentuk Komisi Konstitusi Filipina untuk menetapkan konstitusi 1987. Hasil referendum yang diadakan pada tanggal 3 Februari 1987 menunjukkan bahwa rakyat Filipina menerima konstitusi baru. Isi konstitusi 1987 mencakup pembentukan perwakilan Filipina yang terbagi menjadi tiga yaitu Eksekutif, Legislatif dengan sistem bikameral, dan Yudikatif. Sistem pemerintahan yang tadinya sistem parlementer dikembalikan ke sistem presidensial. Pemilihan presiden diadakan setiap enam tahun sekali. Hingga saat ini, konstitusi 1987 masih dijadikan hukum tertinggi di Filipina.

### **Partisipasi perempuan akibat adanya dorongan**

Kemenangan Megawati Soekarnoputri bersama partainya yaitu PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) pada pemilihan umum tahun 1999 menjadikan sosok Megawati Soekarnoputri menjadi publik figur yang dielu-elukan masyarakat pada masa itu, karena diyakini mempunyai jiwa kepemimpinan seperti yang dimiliki oleh ayahnya yaitu Ir. Soekarno sebagai presiden pertama RI dan juga disebut sebagai simbol perlawanan terhadap pemerintahan Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Selama masa pemerintahannya permasalahan utama yang dihadapi Presiden Megawati adalah Indonesia sedang berada dalam krisis multidimensi. Selain itu, Indonesia juga mengalami beberapa krisis akibat perkembangan lingkungan Internasional yang menyebabkan terjadinya krisis global. di bawah kepemimpinan Presiden Megawati ini mampu mengatasi sebagian besar krisis multidimensi yang terjadi di Indonesia antara tahun 2001 dan 2004.

### **Partisipasi adanya variabel individu semacam keturunan, usia, jenis kelamin, kondisi visiologi**

Keberhasilan tersebut tidak membuat nama presiden megawati semakin mentereng sebagai prestasi dalam pemilihan umum berikutnya yang dilaksanakan tahun 2004, melainkan nama lain yang memiliki kedudukan teratas dalam sebuah angket menjelang pemilu putaran kedua yaitu mantan menternya dalam kabinet gotong royong Susilo Bambang Yudhoyono dengan perolehan 61 persen sedangkan Megawati memperoleh 29 persen di posisi dua dalam survei The International Foundation for Electoral Systems (IFES). Hal tersebut tentu saja menjadi acuan presiden Megawati tidak kembali berkesempatan dalam memimpin. Publik lebih mempercayakan kepada calon baru untuk memimpin Indonesia. walaupun demikian karir Megawati dalam dunia perpolitikan di Indonesia masih berlanjut sampai sekarang walaupun tidak sebagai calon utama pada kontestasi pemilu, tetapi sebagai tokoh yang menjadi pemenang presiden Indonesia saat ini yaitu presiden Joko Widodo.

Sementara itu, dalam menghantarkan ke pimpinan negara, Corazon Aquino diusung oleh partai Laban Ng Demokratikong Pilipino (LDP) sebagai wanita pertama dalam sejarah perpolitikan Filipina. Akan tetapi sama seperti megawati, Cory panggilan Corazon Aquino sebelumnya merupakan pengganti Presiden Marcos. Cory menjadi figur bagi kalangan oposisi dalam menentang pemerintahan otokratik Presiden Ferdinand Marcos. Di Filipina, pada masa pemerintahan Corazon Aquino krisis ekonomi berlanjut hingga tahun 1988-1989 yaitu terjadinya krisis air bersih. Dengan demikian demokrasi yang seharusnya menjamin mayoritas, menunjukkan bahwa demokrasi bukanlah jaminan perbaikan pemerintahan dan

perekonomian, karena para elite dan masyarakat yang bekerja di dana masih merupakan orang-orang yang mempunyai hubungan emosional dengan rezim sebelumnya.

## KESIMPULAN

Partisipasi perempuan dalam perpolitikan maupun penyelenggaraan negara tidak terlepas dari latar belakang keluarga baik dari seorang suami, orang tua, maupun sanak saudara yang sebelumnya telah menjadi salah satu tokoh dalam dunia perpolitikan seperti halnya yang terjadi pada dua tokoh wanita yang menjadi pemimpin negara yaitu Megawati Soekarnoputri sebagai salah satu putri dari seorang tokoh proklamator Indonesia Soekarno yang menjadi andalan dan *Personal branding* dalam menjadi tokoh politik di Indonesia sampai sekarang, walaupun demikian karir perpolitikannya sampai sekarang masih terus di atas sebagai salah satu pimpinan partai politik besar di Indonesia yaitu PDI Perjuangan. Sedangkan untuk Corazon Aquino yang merupakan istri dari seorang tokoh politik terkenal senator Benigno Simeon Aquino jr yang kemudian di beberapa kepemimpinan Filipina berikutnya yaitu Benigno Aquino III walaupun Cory sempat dicalonkan kembali tetapi menolaknya.

Kebijakan keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum (Pemilu), negara mengakui kekuasaan perempuan dalam politik atau bahkan membatasi keterwakilan perempuan dalam politik di kedua negara tersebut yaitu Indonesia dan Filipina. Partisipasi perempuan dalam politik harus diimbangi dengan dominasi massa laki-laki dalam posisi politik. Namun terdapat beberapa hambatan yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia politik (kekuasaan legislatif dan eksekutif). Hal ini disebabkan masih adanya beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam politik, seperti kuatnya budaya patriarki di masyarakat yang memperkuat seluruh aspek kehidupan politik terutama pada lembaga tertinggi sebagai pengambil keputusan. Di bidang politik, peran laki-laki menjadi dominasi di lembaga eksekutif dan legislatif. Selain itu, modal merupakan hambatan khusus bagi partisipasi politik perempuan di Indonesia maupun Filipina. Dengan demikian, keturunan tokoh politik dapat selalu berpartisipasi dalam bidang politik, hal tersebut cukup menjanjikan karena garis keturunan telah memiliki basis massa atau pemahaman tentang hambatan, kepentingan, atau bahkan konflik-konflik yang ada di dalam politik.

## REFERENSI

- Arawi, F. A. (2022). Perbandingan Representasi Perempuan di Parlemen Indonesia dan Filipina. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 14 (2), 74–85. <http://doi.org/10.32734/politeia.v14i2.8600>
- Hadi, K. (2019). Perbandingan Penegakan Demokrasi di Indonesia Pasca-Rezim Suharto dan Filipina Pasca-Rezim Marcos. *Journal of international Relations*, 6 (1), 13-29. <http://jos.unsoed.ac.id/index.php/insignia/article/view/1246>
- Inna Junaenah. (2018). *Partisipasi Perempuan Terhadap Pengambilan Keputusan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Demokratis*. 53–54.
- Liando, D. M. (2016). *Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014 )*. 3, 14–28.

- Moch Eryk Kamsori, A. A. S. (2015). Pemilihan Umum, Media Massa, dan Wanita: Pandangan Majalah TEMPO dan GATRA terhadap Megawati Soekarnoputri sebagai Calon Presiden di Indonesia pada Tahun 1999 dan 2004. *Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah*, 3(1), 71-80.
- Nimrah dan Sakaria, S., Kunci, K., & Budaya Patriarki, dan. (2015). Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014 ). *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(2), 2407–9138.
- Sastrawati, N. (2020). Partisipasi Politik Dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S Coleman. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 19(2), 187. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i2.12730>
- Silalahi, U. (2012). Metode penelitian sosial. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Warjiyati, S. (2016). Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 6(1), 1–27. <https://doi.org/10.15642/ad.2016.6.1.1-27>